



RENCANA KINERJA TAHUN 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2025



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu, revisi dokumen dilakukan apabila terdapat perubahan dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Kerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang ditargetkan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dokumen RKT ini disusun berdasarkan Indikator Kinerja di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2025-2029. Dengan tersusunnya RKT 2025 diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Perjanjian Kinerja TA 2025.

Demikian disampaikan Rencana Kinerja Tahunan dalam rangka mendukung meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Jakarta, 2024
Kepala Badan,



Ir. Subagiyo, M.T.
NIP 197011101997031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum BPSDM Perhubungan.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi BPSDM Perhubungan.....	2
C. Struktur Organisasi.....	4
BAB II	5
PERENCANAAN BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2025 - 2029.....	5
A. SASARAN STRATEGIS BPSDM PERHUBUNGAN 2025 - 2029.....	5
B. RENCANA KINERJA BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2025.....	9
BAB III	17
RENCANA KINERJA BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025	17
A. INDIKATOR KINERJA.....	17
B. TARGET KINERJA 2025	18
BAB IV	21
PENUTUP	21
LAMPIRAN	22
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dan dipimpin oleh Kepala Badan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang perhubungan.

Adanya perubahan nomenklatur dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dimana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai kedudukan langsung di bawah Menteri Perhubungan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi BPSDM Perhubungan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
2. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
4. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

C. Struktur Organisasi

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Adapun pembinaannya, dalam aspek teknis administratif dilimpahkan kepada Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Kemudian pembinaan dan bimbingan dalam aspek teknis operasional pendidikan dan pelatihan dilimpahkan kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan masing-masing.

Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah :

a. Matra Perhubungan Darat

- 1) Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD;
- 2) Politeknik Keselamatan dan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal;
- 3) Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Poltrans) SDP Palembang;
- 4) Politeknik Perkeretaapian Indonesia di Madiun;
- 5) Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali;
- 6) Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah.

b. Matra Perhubungan Laut

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP);
- 2) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;
- 3) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar;
- 4) Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP);
- 5) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta;
- 6) Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati;
- 7) Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat;
- 8) Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten;
- 9) Politeknik Ilmu Pelayaran (Poltekpel) Surabaya;
- 10) Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Barombong;
- 11) Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong;
- 12) Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sulawesi Utara.

c. Matra Perhubungan Udara

- 1) Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;
- 2) Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan;
- 3) Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang;
- 4) Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya;
- 5) Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar;
- 6) Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura;
- 7) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug;
- 8) Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi.

d. Aparatur Perhubungan

- 1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3K) Pasir Jambu – Bandung.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

Struktur organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

A. SASARAN STRATEGIS BPSDM PERHUBUNGAN 2025-2029

Sasaran Strategis BPSDM Perhubungan merupakan sasaran yang ingin diraih dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis BPSDM Perhubungan tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten
3. Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.
4. Sasaran 4 Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel
5. Sasaran 5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi
6. Sasaran 6 Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan
7. Sasaran 7 Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP

Berdasarkan Sasaran Program/Kegiatan yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama BPSDM Perhubungan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama BPSDM Perhubungan

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	86
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 2	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	Rasio	0,1

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
3.	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	IKP 3	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	%	92,00

B. RENCANA KINERJA BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2025

Berikut uraian Sasaran Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebagai berikut :

- Sasaran Program/Kegiatan 1 :**
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tabel 2.2 Sasaran Program/Kegiatan 1 BPSDM Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	IKP 1. Indeks Reformasi Kementerian Perhubungan	Indeks	86	86.5	87	87.5	88

- Sasaran Program/Kegiatan 2 :**
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum

Tabel 2.2 Sasaran Program/Kegiatan 2 BPSDM Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	IKP 2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	Indeks	0,1	0,1	0,1	0	0

3. Sasaran Program/Kegiatan 3 :
Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten

Tabel 2.4 Sasaran Program/Kegiatan 3 BPSDM Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	Persen	92	92	93,2	93,2	93,2
2.	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	Persen	98	98	98	98	98
3.	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi	Persen	88	88	90	90	90

Rencana Kinerja BPSDM Perhubungan yang tertuang dalam rencana strategis 2025-2029, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 : Rencana Strategis BPSDM Perhubungan 2025-2029

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	86	86.5	87	87.5	88
SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	Rasio	0,1	0,1	0,1	0	0
SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	Persen	92	92	93,2	93,2	93,2
	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	Persen	98	98	98	98	98
	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi	Persen	88	88	90	90	90

BAB III

PERENCANAAN KINERJA

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja merupakan rumusan yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran Kinerja yang bersifat kuantatif atau kualitatif. Indikator memberikan informasi sejauh mana sasaran strategis yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh indikator yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa sasaran strategis terkait juga telah dapat dicapai. Secara keseluruhan Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tahun 2025 sebagai berikut :

1. Indeks RB Kementerian Perhubungan;
2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan;
3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten.

B. TARGET KINERJA 2025

Target Kinerja BPSDM Perhubungan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan sebagai Penetapan Kinerja Tahun 2025 mencakup Program Pendidikan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen. Target *output* yang dihasilkan terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Target Kinerja BPSDM Perhubungan Tahun Anggaran 2025

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		VOLUME	SATUAN
SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	86	Indeks
SP.WA.02. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat Dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	0,1	Rasio
SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	92	%
	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	98	%
	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi	88	%

Adapun target Rencana Kinerja Tahunan BPSDM Perhubungan tahun anggaran 2025 adalah :

1. **Indikator Kinerja Utama** : Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan
Definisi : Reformasi Birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia, juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke – 21.

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program 1 (IKP 1)

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1.	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	86

2. **Indikator Kinerja Utama** : Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat *Class Action* oleh Masyarakat dibandingkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan.

Definisi : Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat "*Class Action*" oleh masyarakat dibandingkan dengan jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan Pada tahun 2024, diharapkan seluruh Regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenhub tidak mendapatkan "*Class Action*" dari masyarakat Angka Rasio adalah 1 s.d. 0,

Di mana:

1 = seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenhub di "*Class Action*" oleh masyarakat

0 = seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenhub tidak di "*Class Action*" oleh masyarakat.

Cara Menghitung

$C_{reg} \times W_{reg} + C_{kaj} \times W_{kaj} + C_{kajst} \times W_{kajst}$

$W_{reB} = 65\%$

$W_{Kaj} = 25\%$

$W_{kajst} = 10\%$

Regulasi Kemenhub yang Implementatif (C_{reg})

Tingkat kemanfaatan rumusan Rekomendasi Kebffakan di Bidang Perhubungan (C_{Kaj})

Persentase Rumusan Rekomendasi Kebijakan pada (t-2) yang dimanfaatkan/diterima oleh Menteri Perhubungal, sub sektor dan *Stakeholder*

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Program 2 (IKP 2)

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
2.	IKP 2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	Rasio	0,1

3. **Indikator Kinerja Utama** : Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten
Definisi : Pemenuhan Sumber daya manusia dalam bidang Transportasi yang berkompeten.

Cara Menghitung:

Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten dan Berkeselamatan:

$(C_{vokasi} \times W_{vokasi}) + (C_{kompetensi} \times W_{kompetensi})$

Keterangan :

W_{vokasi} = Bobot Persentasi penyerapan lulusan diklat pembentukan 60%.

$W_{kompetensi}$ =Bobot persentase lulusan diklat transportasi yang bersertifikat kompetensi 40%.

Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi (Cvokasi).
 Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat kompetensi (Ckompetensi).

Target Kinerja :

Tercapainya Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten dengan target 85%.

Tabel 3.3 : Indikator Kinerja Program 3 (IKP 3)

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
2.	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%	85

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan disusun dalam rangka menyampaikan informasi target yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun anggaran 2025. Informasi yang disajikan merupakan gambaran umum rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun baik fisik maupun keuangan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan kegiatan tahun 2025.

Melalui Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun, diharapkan pelaksana kegiatan memiliki panduan yang terarah dalam mewujudkan target yang sudah ditetapkan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan sehingga kami sangat mengharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja BPSDM Perhubungan ke depannya.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini disusun untuk sebagai acuan dalam melaksanakan program kerja tahun 2025.

LAMPIRAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
BPSDM PERHUBUNGAN

Unit Eselon I : BPSDM Perhubungan
 Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	86
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 2	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat <i>Class Action</i> oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan	Rasio	0,1
3.	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	IKP 3	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	%	92,00